

## ANALISIS HUKUM KEBIJAKAN TARIF CUKAI TERHADAP INDUSTRI HASIL TEMBAKAU DI SUMATERA UTARA

Agung Yuriandi \*)  
Ningrum Natasya Sirait \*\*)  
Runtung Sitepu \*\*)  
Mahmul Siregar \*\*)

### ABSTRAK

Tembakau adalah jenis komoditi yang dikenakan cukai oleh negara. Penerapan cukai terhadap tembakau sudah dilaksanakan pada zaman kerajaan di Indonesia. Indonesia menyumbang 2,1% dari persediaan tembakau di seluruh dunia. Industri Hasil Tembakau berkontribusi bagi penerimaan negara melalui cukai. Dari sisi penerimaan negara berupa devisa, nilai ekspor tembakau dan hasil tembakau juga memegang peranan yang cukup penting. Industri Hasil Tembakau memiliki sumbangan yang besar terhadap penyerapan tenaga kerja juga sebagai salah satu objek yang dapat dijadikan sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang berkaitan dengan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.

Namun, ada tekanan dari luar untuk meratifikasi *Framework Convention on Tobacco Control* yang tidak lain adalah untuk mengendalikan dampak negatif dari rokok ditinjau dari segi kesehatannya. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan Roadmap Industri Hasil Tembakau 2007-2020 dengan visi untuk mewujudkan Industri Hasil Tembakau yang kuat dan berdaya saing di pasar dalam negeri dan global dengan tidak mengenyampingkan aspek kesehatan. Disamping Roadmap Industri Hasil Tembakau 2007-2020 Pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 181/PMK.011/2009 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau untuk meningkatkan penerimaan negara dalam bentuk cukai.

Kebijakan pemerintah tersebut dinamakan kebijakan tarif tunggal (*single tariff policy*) yang memberatkan industri hasil tembakau sedangkan penerimaan negara dapat ditingkatkan. Kebijakan *single tariff* tersebut menyulitkan Industri Hasil Tembakau yang ada di Sumatera Utara karena merupakan industri skala kecil dan menengah. Sudah pasti tidak adil bagi daerah Sumatera Utara yang industrinya merupakan skala kecil dan menengah yang rentan terhadap perubahan harga. Dengan adanya perubahan harga maka konsumen rokok pada industri kecil dan menengah akan mencari substitusi produk.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : perlu adanya kajian terhadap penerapan *single tariff* dan kebijakan yang berdasarkan pada pendapatan negara. Dengan cara mengimbangi antara tujuan meningkatkan pendapatan negara dengan kepentingan masyarakat, pemerintah daerah, dan industri hasil tembakau itu sendiri; sebaiknya pemerintah daerah melakukan upaya-upaya yang bertujuan untuk memperbaiki iklim usaha dengan cara mengurangi *transaction cost* yang ditimbulkan

---

\*) Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

\*\*) Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

oleh peraturan daerah dan memperbaiki infrastruktur investasi di Sumatera Utara; dan melakukan peninjauan ulang terhadap alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang diterima oleh Pemerintah Daerah dengan mempertimbangkan dampak yang diterima oleh lingkungan daerah Industri Hasil Tembakau itu berdiri, juga diperlukan studi lebih lanjut untuk mendapatkan besaran atau porsi yang baik dalam menentukan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang lebih adil bagi daerah Sumatera Utara.

Kata Kunci : - Kebijakan Tarif Tunggal  
- Industri Hasil Tembakau  
- Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau

## **LEGAL ANALYSIS OF INDUSTRIAL POLICY RATES EXCISE OF TOBACCO PRODUCTS INDUSTRY IN NORTH SUMATRA**

**Agung Yuriandi \*)**  
**Ningrum Natasya Sirait \*\*)**  
**Runtung Sitepu \*\*)**  
**Mahmul Siregar \*\*)**

### **ABSTRACT**

Tobacco is the kind of commodities subject to excise duty by the government. The application of excise duty on tobacco has been conducted in the days of empire in Indonesia. Indonesia accounted for 2,1% of the worldwide supply of tobacco. The tobacco industry is contribute to the government revenue through excise. In terms of state revenue in the form of foreign exchange, export value of tobacco and tobacco result also holds an important role. The tobacco has a large contribution to labor absorption also as one of the objects that can be used as source of Revenue for Regional Real Income associated with the Fund For The Tobacco Excise Results.

However, there is pressure from outside to ratify the Framework Convention on Tobacco Control which is none other than to control the negative impacts of smoking in terms of health. Therefore, the government issued a Tobacco Product Industries Roadmap 2007-2020 with the vision to realize the Tobacco Industry, strong and competitive in the domestic and global markets with no waive the health aspects. Besides Roadmap 2007-2020 of Tobacco Product Industries Government also issued a Regulation of the Minister of Finance No. 181/PMK.011/2009 about Tobacco Excise Tariff to Boost Government Revenues In The Form of Excise Duty.

The government policy is called single tariff policy that hold the tobacco industry can be enhanced while government take the revenue. Single Tariff Policy is complicated for Tobacco Product Industries in North Sumatra due to the Small and medium scale of industries. It is certainly not fair to the industrial region of North Sumatra is a small scale and medium enterprises that are vulnerable of price changes. With the change in the consumer price of cigarettes in small and medium industries will find the substitution products.

The results showed that : the need for study of a single application of tariff rates and policies based on government revenue. By the way of balance between the goal of increasing government revenues with the interests of the community, local government, and the tobacco industry itself; local government should make efforts that aim to improve the business climate by reducing the transaction costs incurred by the local regulations and improving infrastructure investments in North Sumatra; and conduct a review of the allocation of Profit Sharing Fund Tobacco Excise results received by the Local Government to consider the environmental impact received by the region's standing Tobacco Industry Results, further studies are also required to

---

\*) Students Master of Law, Faculty of Law, University of North Sumatra

\*\*) Lecturer of Master of Law, Faculty of Law, University of North Sumatra

obtain quantity or a good portion in determining the Sharing Fund Tobacco Excise a fairer results for the region of North Sumatra.

Key Words : - Single Tariff Policy  
- Tobacco Product Industry  
- Profit Sharing Fund Tobacco Excise